

**PENGARUH SEKTOR EKONOMI DOMINAN
TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Wilda Fatmala

Politeknik Baubau

Email : wildafatmala.wf@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui besarnya derajat kemandirian fiskal; dan menguji pengaruh (2) sektor pertanian; (3) sektor konstruksi/bangunan; (4) sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan (5) sektor jasa-jasa terhadap Derajat Kemandirian Fiskal seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa *time series* dan *cross section* tahun 2008 sampai tahun 2012 yang dikumpulkan dengan cara telaah dokumentasi. Penelitian ini menjadikan sektor ekonomi dominan yakni sektor pertanian, sektor konstruksi/bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa sebagai variabel independennya dan Derajat Kemandirian Fiskal sebagai variabel dependennya. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, data dianalisis dengan rasio perbandingan Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah dan regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect* menggunakan *evIEWS 7.0*. Selanjutnya, dilakukan pengujian secara simultan dan parsial atas hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Derajat Kemandirian Fiskal seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun anggaran 2008 sampai dengan 2012 rata-rata sebesar 4.07 %. Di mana perkembangan Derajat Kemandirian Fiskal secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh variabel sektor konstruksi/bangunan, secara positif namun tidak signifikan dipengaruhi oleh variabel sektor pertanian dan sektor jasa-jasa, sementara variabel sektor perdagangan, hotel dan restoran justru memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan.

Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto

**INFLUENCE OF DOMINANT ECONOMIC SECTOR
ON FISCAL INDEPENDENCY REGENCY/CITY
IN SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE**

Wilda Fatmala

Politeknik Baubau

Email : wildafatmala.wf@gmail.com

ABSTRACT

The aims of the research were to : (1) find out to what extent the Degree of Fiscal Independency; and examine the influence of (2) agricultural sector; (3) construction/building sector; (4) commerce, hotel and restaurant sectors; and (5) service sector on the Degree of Fiscal Independency of all the governments of regencies and cities in Southeast Sulawesi Province. The research used secondary data in the form of time series and cross section from 2008 until 2012 obtained using documentation. Independent variables were agricultural sector, construction/building sector, commerce, hotel and restaurant sectors, and service sector, while dependent variable was the

Degree of Fiscal Independency. The data were analyzed with comparative ratio between Regional Original Revenue and the Total of Regional Revenue, and panel data regression and fixed effect approach using eviews 7.0. Then, simultaneous and partial tests were done for research hypothesis. The result of the research indicate that the Degree of Fiscal Independency of all regencies and cities in Southeast Sulawesi Province in the budget year from 2008 to 2012 is 4.07 % on average. The development of the Degree of Fiscal Independency is positively and significantly influenced by construction/building sector variable. It is positively but insignificantly influenced agricultural sector and service sector. Meanwhile, commerce, hotel and restaurant sectors have a negative and significant influence.

Key Words : Fiscal Decentralization, Fiscal Independency, Regional Original Revenue, Gross Regional Domestic Product

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan proses pelimpahan dan penyerahan kewenangan dengan asas desentralisasi (Karianga, 2013). Pada prinsipnya asas desentralisasi adalah : (1) penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya sendiri; (2) merupakan suatu asas yang bermaksud melakukan pembagian wilayah negara menjadi daerah besar dan daerah kecil yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri; (3) merupakan suatu asas yang bermaksud membentuk pemerintahan di daerah yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri; (4) menimbulkan daerah-daerah otonom; dan (5) merupakan bentuk susunan organisasi negara yang terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan yang lebih rendah yang dibentuk baik berdasarkan teritorial maupun fungsi pemerintahan tertentu (Handoyo, 2000). Adapun tujuan yang hendak dicapai antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam pertumbuhan (Widjaja, 2007).

Agar tujuan desentralisasi tersebut dapat tercapai, menurut Bird dan Vaillancourt (2000), ada dua syarat penting untuk kesuksesan desentralisasi, yaitu : (1) proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, yaitu pengambilan keputusan tentang manfaat dan biayanya harus transparan dan pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk memengaruhi keputusan-keputusan tersebut; (2) yang lebih sesuai dengan rancangan kebijakan biaya dari keputusan yang diambil, sepenuhnya harus ditanggung oleh masyarakat setempat. Untuk itu, seharusnya tidak perlu terjadi ekspor pajak dan tidak ada tambahan transfer dari jenjang pemerintahan yang lain.

Pandangan di atas juga didukung oleh pandangan yang dikemukakan oleh Halim (2004), bahwa suatu daerah dianggap berhasil atau mampu melaksanakan otonomi apabila daerah tersebut memiliki : (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya; dan (2) ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Desentralisasi fiskal dihubungkan dengan pandangan Bird dan Vaillancourt (2000) dan Halim (2004), maka sudah seharusnya bagi daerah-daerah otonom untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaannya dengan melibatkan masyarakat. Sumber-sumber penerimaan keuangan daerah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok utama yakni : sumber PAD dan sumber pendapatan non asli daerah (non-PAD).

Penyelenggaraan otonomi yang sehat hanya tercapai apabila sumber utama keuangan daerah guna membiayai aktivitas daerah berasal dari PAD atau paling tidak pembiayaan rutinnya ditutup oleh hasil PAD (Karo, 2005).

Kecilnya kontribusi PAD dalam membiayai rumah tangga seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, menunjukkan bahwa pada dasarnya sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat. Tingginya tingkat ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat dan rendahnya kemampuan keuangan yang dialami oleh sebagian besar daerah-daerah di Indonesia, juga ditunjukkan oleh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ketidakberdayaan PAD yang ditunjukkan oleh seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, khususnya seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam membiayai daerahnya sendiri dapat menunjukkan bahwa sebagian besar daerah-daerah di Indonesia belum berhasil dalam menjawab berbagai tantangan otonomi yaitu desentralisasi, khususnya desentralisasi fiskal. Di mana, desentralisasi fiskal merupakan bagian penting dalam implementasi otonomi yakni upaya pemerintah daerah untuk memusatkan perhatiannya untuk memperbesar peranan PAD dalam struktur penerimaan daerah guna meningkatkan kemandirian keuangannya (Zaenuddin, 2012).

Tabel 1.

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah
Seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2011 (%)

Kabupaten/Kota	Jenis Pertumbuhan	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
Kabupaten Buton	Ekonomi	8.7	8.6	7.73	10.84
	PAD	27.15	18.06	26.09	-8.98
Kabupaten Muna	Ekonomi	8.46	9.86	7.78	9.49
	PAD	-7.11	23.91	50.73	-43.68
Kabupaten Konawe	Ekonomi	7.3	9.71	6.66	7.9
	PAD	-32.32	47.84	26.15	37.29
Kabupaten Kolaka	Ekonomi	2.17	1.96	12.04	13.07
	PAD	22.22	43.15	-8.00	15.20
Kabupaten Konawe Selatan	Ekonomi	9.38	11.68	9.72	8.06
	PAD	-55.85	-29.13	77.37	8.81
Kabupaten Bombana	Ekonomi	8.24	7.74	8.06	7.49
	PAD	467.90	-45.76	72.01	27.93
Kabupaten Wakatobi	Ekonomi	7.21	13.67	11.49	10.43
	PAD	96.13	-21.93	41.47	-17.05
Kabupaten Kolaka Utara	Ekonomi	3.64	7.08	7.25	8.93
	PAD	6.30	3.35	-19.37	385.66
Kabupaten Buton Utara	Ekonomi	7.57	10.56	9.14	9.33
	PAD	-	322.34	42.35	-0.73
Kabupaten Konawe Utara	Ekonomi	9.40	11.99	8.22	9.01
	PAD	-	-26.93	-17.06	-47.97
Kota Kendari	Ekonomi	10.49	11.88	9.89	10.02
	PAD	14.05	5.39	38.07	34.37
Kota Baubau	Ekonomi	7.79	10.79	9.12	9.40
	PAD	62.27	11.79	-1.73	-10.13

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah tahun 2014)

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini menitikberatkan pada pertumbuhan perekonomian yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto sebagai faktor yang dapat memberikan pengaruh pada kemandirian fiskal yang juga dikenal sebagai Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) atau juga Derajat Otonomi Fiskal (DOF) dengan PAD sebagai indikator utama. Zaenuddin (2012) mengemukakan bahwa semakin tinggi DKF suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana derajat kemandirian fiskal seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara?
2. Apakah sektor pertanian berpengaruh terhadap derajat kemandirian fiskal seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara?
3. Apakah sektor konstruksi/bangunan berpengaruh terhadap derajat kemandirian fiskal seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara?
4. Apakah sektor perdagangan, hotel dan restoran berpengaruh terhadap derajat kemandirian fiskal seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara?
5. Apakah sektor jasa-jasa berpengaruh terhadap derajat kemandirian fiskal seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara?

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Daerah

Kegiatan pemerintah termasuk pemerintah daerah semakin meningkat dari masa ke masa. Sebagai konsekuensinya maka diperlukan pembiayaan atas pengeluaran pemerintah sesuai dengan semakin luasnya kegiatan pemerintah. Agar supaya kebutuhan biaya bagi pemerintah daerah dapat dipenuhi maka daerah memerlukan aliran uang masuk ke kas daerah sebagai penerimaan atau pendapatan daerah.

Fauzi dan Iskandar (1982) dalam Saharuddin (2001) mendefinisikan pendapatan daerah sebagai komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pembangunan dan melancarkan jalannya pemerintahan. Karena itu, setiap daerah harus berupaya agar pendapatan daerah dapat dipungut seintensif mungkin.

Agar supaya kebutuhan biaya bagi pemerintah daerah dapat dipenuhi, maka kepala daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya, salah satu di antaranya adalah kewenangan dalam bidang keuangan daerah (Adisasmita, 2011) yang meliputi : (1) pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah; (2) penyelenggaraan, pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah; dan (3) penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perhitungan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah merupakan semua penerimaan daerah baik yang bersumber dari daerah yang bersangkutan maupun pemerintah di atasnya sebagai arus masuk dari manfaat aktivitas ekonomi pada tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Adapun pendapatan yang dapat dikelola oleh daerah menurut Rosdini (2008) adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan daerah yang positif mempunyai kemungkinan memperbaiki kondisi perekonomian menjadi lebih baik (Sidik, 2002). Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD

dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain (Silaen, Widjayanto dan Effendy, 2012).

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pembagian penerimaan antar-tingkatan pemerintahan guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi (Karianga, 2013). Alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah secara garis besar ditentukan oleh dua faktor, yaitu kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) dan kebutuhan fiskal (*fiscal need*). Hyman mengemukakan bahwa kapasitas fiskal mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk mendanai jasa-jasa pelayanan publik yang harus disediakan pemerintah. Sedangkan kebutuhan fiskal menunjukkan total pengeluaran yang dibutuhkan suatu daerah untuk melaksanakan aktivitas di daerahnya. Dalam proses pengurangan ketimpangan pada kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pemerintah pusat dan daerah yaitu melalui pelaksanaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Halim dan Iqbal, 2012).

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat (Nurcholis, 2005). Hibah kepada daerah, yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui pemerintah (pusat). Pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk keperluan mendesak (bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa) yang tidak dapat diatasi oleh daerah dengan menggunakan sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kemandirian Fiskal

Salah satu syarat kesuksesan desentralisasi yang dikemukakan oleh Bird dan Vaillancourt (2000), adalah biaya-biaya dari keputusan yang diambil, sepenuhnya harus ditanggung oleh masyarakat setempat. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan untuk memiliki kemandirian dalam membiayai segala kegiatan pemerintah daerahnya.

Kemandirian daerah tidak hanya diartikan sebagai kemandirian dari sisi keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, tetapi lebih luas lagi dari sisi ekonomi di mana daerah benar-benar mampu membangun perekonomian di semua sektor pembangunan (Yuniarti, 2008). Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah yang dijalankan yakni tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat (World Bank dalam Ladjin, 2008). Selanjutnya Silaen, Widjayanto dan Effendy (2012), mengemukakan bahwa kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain.

Karo (2005), menjelaskan bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah *self-supporting* dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonominya. Ini berarti, dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang.

Untuk mengukur seberapa besar tingkat kemandirian fiskal suatu daerah digunakan ukuran yang disebut *Administrative Independency Ratio* (AIR) atau dapat disebut derajat kemandirian fiskal atau derajat otonomi fiskal yaitu rasio antara PAD

terhadap total penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang sama, tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat (Suprajitno, 2003). Selanjutnya menurut Kementerian Keuangan RI (2013), untuk mengukur derajat kemandirian fiskal dapat diproksi dari rasio antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) dalam APBD. Rasio akan menunjukkan tingkat kesehatan semakin baik bila terus meningkat, akan tetapi perlu diperhatikan pula bila terjadi kenaikan secara kontinyu atas pendapatan bunga, karena hal tersebut bisa diartikan terdapat peningkatan dana Pemda yang disimpan dalam bank dan tidak dibelanjakan.

Pengembangan Hipotesis

Dengan demikian, dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. H1 : derajat kemandirian fiskal seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara masih rendah.
2. H2 : sektor pertanian berpengaruh positif terhadap derajat kemandirian fiskal.
3. H3 : sektor konstruksi/bangunan berpengaruh positif terhadap derajat kemandirian fiskal.
4. H4 : sektor perdagangan, hotel dan restoran berpengaruh positif terhadap derajat kemandirian fiskal.
5. H5 : sektor jasa-jasa berpengaruh positif terhadap derajat kemandirian fiskal.

METODOLOGI PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Hipotesis yang digunakan adalah hipotesis korelasional (hubungan) yakni suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2012).

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan independen. Variabel dependennya adalah Derajat Kemandirian Fiskal, sedangkan variabel independennya adalah sector perekonomian yang berkontribusi dominan dalam Produk Domestik Regional Bruto yakni sektor pertanian, sektor konstruksi/bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Total Pendapatan Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto. Sedangkan sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik *Judgemental Sampling*. Adapun data yang digunakan sebagai sampel dan obyek dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah di seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008 sampai dengan 2012.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni data yang diperoleh dalam bentuk jadi yang berupa publikasi, dengan kata lain data telah dikumpulkan oleh instansi atau pihak lain (Supranto, 1992). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data runtun waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Adapun data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku laporan tahunan yakni data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui telaah dokumentasi, yakni data yang menyangkut keseluruhan komponen data yang dibatasi dalam jangka waktu 5 tahun pengamatan (tahun 2008 sampai dengan 2012).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel digunakan untuk menjawab tujuan

penelitian kedua, ketiga, keempat dan kelima. Adapun untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan, digunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh Tim Litbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991), yaitu :

- a. Sangat Rendah : 0.00 % - 10.00 %
- b. Rendah : 10.01 % - 20.00 %
- c. Sedang : 20.01 % - 30.00 %
- d. Cukup : 30.01 % - 40.00 %
- e. Tinggi : 40.01 % - 50.00 %
- f. Sangat Tinggi : > 50.00 %

1. Model *Common Effect/Pooled Least Square* (PLS)

Adapun persamaan berdasarkan model *common effect*, yaitu :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

2. Model *Fixed Effect* (FEM)

Adapun persamaan berdasarkan model *fixed effect*, yaitu :

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

3. Model *Random Effect* (REM)

Adapun persamaan berdasarkan model *random effect*, yaitu :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + u_i + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

Y = Derajat Kemandirian Fiskal

X1 = Sektor Pertanian

X2 = Sektor Konstruksi/Bangunan

X3 = Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

X4 = Sektor Jasa-Jasa

i = Tempat (Kabupaten dan Kota)

t = Tahun

β = Koefisien Konstanta

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dikhususkan untuk analisis regresi linier berganda data panel, yakni :

1. Y_{it} = DKF, yaitu rasio perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah yang terdapat pada APBD seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara (dalam persen).
2. X_{1it} = total nilai produksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh sektor pertanian setiap kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan harga konstan 2000 (dalam rupiah).
3. X_{2it} = total nilai produksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh sektor konstruksi/bangunan setiap kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan harga konstan 2000 (dalam rupiah).
4. X_{3it} = total nilai produksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran setiap kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan harga konstan 2000 (dalam rupiah).
5. X_{4it} = total nilai produksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh sektor jasa-jasa setiap kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan harga konstan 2000 (dalam rupiah).

HASIL PENELITIAN

Analisis Derajat Kemandirian Fiskal Seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara

Tabel 2.
Derajat Kemandirian Fiskal Seluruh Kabupaten dan Kota
di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2012 (%)

No	Kabupaten/Kota	Derajat Kemandirian Fiskal Per Tahun					Rata-Rata
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	Buton	2.59	3.08	3.40	2.51	2.93	2.90
2	Muna	3.92	4.28	6.32	3.21	2.48	4.04
3	Konawe	1.93	2.47	2.94	3.31	2.84	2.70
4	Kolaka	4.44	6.45	5.38	5.22	4.79	5.26
5	Konawe Selatan	2.09	1.44	2.32	2.14	2.71	2.14
6	Bombana	3.58	2.14	3.46	3.45	4.71	3.47
7	Wakatobi	2.97	2.48	3.42	2.45	4.21	3.11
8	Kolaka Utara	2.25	2.35	1.86	7.61	3.60	3.53
9	Buton Utara	0.76	1.46	1.63	1.57	2.73	1.63
10	Konawe Utara	11.98	4.45	3.39	1.86	2.23	4.78
11	Kendari	7.00	6.99	8.01	9.01	9.51	8.11
12	Baubau	6.29	6.75	6.50	4.51	4.97	5.80
Sulawesi Tenggara		4.02	3.89	4.29	4.08	4.06	4.07
Se Indonesia		7.25	7.49	7.40	8.57	9.88	8.12

Sumber : Data diolah tahun 2014

PEMBAHASAN

Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh Derajat Kemandirian Fiskal dengan rata-rata sebesar 4.07 %. Selain itu, Derajat Kemandirian Fiskal pada tahun anggaran tersebut juga cukup jauh dari rata-rata Derajat Kemandirian Fiskal seluruh kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun anggaran yang sama yakni sebesar 8.12 %. Hal ini berarti bahwa pada tahun anggaran tersebut seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Derajat Kemandirian Fiskal dengan kategori yang sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara belum mampu menjawab tantangan otonomi daerah yakni desentralisasi fiskal. Hal ini ditunjukkan dengan proporsi transfer dari pemerintah pusat terhadap Total Pendapatan Daerah yang relatif semakin besar, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.
Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan Daerah

No	Tahun	Dana Perimbangan (Ribu Rupiah)	Total Pendapatan Daerah (Ribu Rupiah)	Kontribusi (%)
1	2008	4,087,472,861	4,635,287,032	88.18
2	2009	4,521,454,475	5,100,297,388	88.65
3	2010	4,652,656,354	5,564,902,120	83.61
4	2011	4,999,532,190	6,502,251,091	76.89
5	2012	6,190,698,873	7,327,501,330	84.49
Rata-rata		4,890,362,950.60	5,826,047,792.20	84.36

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah tahun 2014)

Pengaruh Sektor Pertanian terhadap Derajat Kemandirian Fiskal

Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan model *fixed effect*, menunjukkan bahwa variabel sektor pertanian memberikan pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap Derajat Kemandirian Fiskal. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sektor pertanian merupakan variabel yang dapat memengaruhi Derajat Kemandirian Fiskal seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hasil penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Suprajitno (2003) sejalan dengan yang dikemukakan oleh World Bank (2008) dalam Agustono (2013) yang mengemukakan bahwa pertanian dapat berkontribusi pada pembangunan sebagai sebuah aktivitas ekonomi, mata pencaharian dan sebagai cara untuk melestarikan lingkungan, sehingga sektor ini dapat menjadi sebuah instrumen yang unik bagi pembangunan. Sebagai sebuah aktivitas ekonomi, pertanian dapat menjadi sumber pertumbuhan bagi perekonomian wilayah, penyedia investasi bagi sektor swasta dan sebagai penggerak utama industri-industri yang terkait dengan bidang pertanian.

Pengaruh Sektor Konstruksi/Bangunan terhadap Derajat Kemandirian Fiskal

Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan model *fixed effect*, menunjukkan bahwa variabel sektor konstruksi/bangunan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel sektor konstruksi/bangunan merupakan variabel yang dapat memengaruhi Derajat Kemandirian Fiskal seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Putrawan dan Sudirman (2013) bahwa sejak dekade terakhir ini sektor bangunan/konstruksi tumbuh pesat dan menakjubkan. Peristiwa ini ditandai dengan maraknya pembangunan dibidang properti yang dipasarkan untuk memenuhi permintaan domestik yang semakin meningkat. Kebijakan pemerintah dalam memenuhi permintaan dalam hal moneter dan fiskal, terutama dalam hal kredit perbankan ikut memengaruhi meningkatnya produk pembangunan. Adanya pengaruh pembangunan, perekonomian, dan pariwisata mengakibatkan alih fungsi lahan dari tanah sawah/persawahan menjadi tanah kering untuk permukiman/perumahan, akomodasi pariwisata sebagai penunjang atau pendukung pembangunan, perekonomian, dan pariwisata. Dengan beralih fungsinya lahan mengakibatkan nilai tanah berubah, di mana nilai jual objek pajak akan naik, sehingga secara otomatis perolehan atas pajak bumi dan bangunan akan naik pula.

Pengaruh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran terhadap Derajat Kemandirian Fiskal

Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan model *fixed effect*, menunjukkan bahwa variabel sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap Derajat Kemandirian Fiskal. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan variabel yang belum dapat memengaruhi Derajat Kemandirian Fiskal diseluruh kabupaten dan kota Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Suprajitno (2012) yang dilakukan di Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan metode *partial adjustmen model*. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dan penelitian Suprajitno (2012) bertolak belakang dengan pandangan yang dikemukakan Widiastuti (2013) bahwa meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap Produk Domestik Regional Bruto serta kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Pertumbuhan Sektor Jasa-jasa terhadap Derajat Kemandirian Fiskal

Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan model *fixed effect*, menunjukkan bahwa variabel sektor jasa-jasa memberikan pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap Derajat Kemandirian Fiskal. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel sektor jasa-jasa merupakan variabel yang memengaruhi derajat kemandirian fiskal seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Suprajitno (2012) yang dilakukan di Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan metode *partial*

adjustmen model. Hasil dari penelitian ini dan penelitian Suprajitno (2012) didukung oleh pandangan yang dikemukakan oleh Haryanto (2006), bahwa tinggi rendahnya kapasitas fiskal daerah sebagai pencerminan kemandirian daerah dipengaruhi oleh pajak daerah, retribusi daerah, Produk Domestik Regional Bruto jasa, dan bagi hasil pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, adalah :

1. Pada tahun anggaran 2008-2012, seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Derajat Kemandirian Fiskal yang sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun anggaran tersebut masih memiliki ketergantungan yang sangat besar pada bantuan pemerintah pusat dalam membiayai urusan pemerintahannya.
2. Ketidakmampuan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam membiayai urusan pemerintahannya menunjukkan bahwa kabupaten/kota tersebut belum mampu menjawab tantangan dari otonomi daerah yakni desentralisasi.
3. Variabel sektor pertanian dapat memberikan pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap Derajat Kemandirian Fiskal seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun anggaran 2008-2012.
4. Variabel sektor konstruksi/bangunan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Derajat Kemandirian Fiskal seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun anggaran 2008-2012.
5. Variabel sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Derajat Kemandirian Fiskal seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun anggaran 2008-2012.
6. Variabel sektor jasa-jasa dapat memberikan pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap Derajat Kemandirian Fiskal seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun anggaran 2008-2012.
7. Signifikannya pengaruh negatif variabel sektor perdagangan, hotel dan restoran dan tidak signifikannya pengaruh positif variabel sektor pertanian dan sektor jasa-jasa terhadap DKF pada dasarnya disebabkan oleh pertumbuhan PAD seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun anggaran 2008-2012 yang juga diiringi oleh pertumbuhan pada TPD di tahun yang sama.
8. Besarnya dominasi bantuan pemerintah pusat pada total pendapatan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, berarti bahwa kemampuan menyerap potensi PAD yakni potensi penerimaan pajak dan retribusi menjadi pajak dan retribusi daerah belum optimal.
9. Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang memberikan kontribusi dominan jika dibandingkan sektor ekonomi lainnya dalam PDRB di Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun, sektor ekonomi tersebut tidak dapat diserap secara langsung sebagai pajak dan retribusi daerah seperti halnya sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa.

Saran

Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini, penulis menyarankan agar :

1. Pemerintah daerah harus selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuannya dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya yang salah satu di antaranya adalah dengan menumbuhkembangkan perekonomian daerah demi menjawab tantangan otonomi daerah yakni desentralisasi fiskal.
2. Dalam upaya menumbuhkembangkan perekonomian daerah, pemerintah daerah harus memilih sektor ataupun komoditi mana saja yang memiliki potensi pengaruh

- yang besar dalam perekonomian yang dapat dijadikan sebagai potensi pajak dan retribusi daerah yang dapat diserap menjadi pajak dan retribusi daerah.
3. Pemerintah daerah harus mampu menarik/memungut balas jasa atas pemanfaatan infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintah. Balas jasa tersebut berupa pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari PAD yang merupakan indikator utama kemandirian fiskal.
 4. Bagi peneliti selanjutnya, harus lebih menitikberatkan pada sektor ekonomi yang dapat dijadikan sebagai potensi pajak dan retribusi daerah dan memberikan pengaruh langsung pada peningkatan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Prio Hari. 2005. *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana : 3.
- Agustono. 2013. *Analisis Sektor Pertanian Ditinjau dari Peran terhadap Pertumbuhan dan Stabilitas PDRB di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal SEPA, 9/2 : 283-296.
- Aisyah, Siti. 2007. *Peranan Sektor Publik Lokal dalam Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Surakarta*. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Astuti, Tutut Dewi dan Di Asih I Maruddani. 2009. *Analisis Data Panel untuk Menguji Pengaruh Risiko terhadap Return Saham Sektor Farmasi dengan Least Square Dummy Variable*. Jurnal Media Statistika. Vol. 2, No. 2 : 71-80.
- Badan Litbang Depdagri RI dan Fisipol UGM. 1991. *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II dalam Rangka Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Jakarta.
- Chadidjah, Anna dan Indra Elfiyan. 2009. *Model Regresi Data Panel untuk Menaksir Realisasi Total Investasi Asing dan Dalam Negeri (Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat)*. Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika.
- Erawati, Ni Komang dan I Nyoman Mahaendra Yasa. 2012. *Analisis Pola Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Potensial Kabupaten Klungkung*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Udayana : 5.
- Ibrahim, Muhammad Achyar. 2012. *Analisis Aspek Keuangan dalam Pengembangan Empat Komoditi Unggulan dan Penyiapan Aplikasi Penganggaran untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Kabupaten Bantaeng*. Tesis. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Jolianis. 2012. *Analisis Perekonomian Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat*. Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat. Vol. 1, No. 1 : 5.
- Kasmita, Dian Alfira. 2013. *Pengaruh Sektor Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau*. Jurnal FKIP Universitas Riau.
- Kementerian Keuangan RI. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah)*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI. 2013. *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012*. Jakarta.
- Kusnandar dan Dodik Siswanto. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal*. Jurnal Universitas Indonesia : 7.
- Ladjin, Nurjanna. 2008. *Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Tengah)*. Tesis. Semarang : Undip.
- Larmanto. 2008. *Implementasi Kebijakan Pemungutan PBB di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar*. Surakarta, Universitas Sebelas Maret.

- Maryani. 2002. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi untuk Menciptakan Kesempatan Kerja di Kota Makassar Sulawesi Selatan*. Tesis. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Masyhuri. 2007. *Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merangin*. Universitas Andalas : 17.
- Nanga, Munga. 1991. *Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II (Studi Kasus di Kabupaten Malang, Probolinggo, dan Trenggalek Provinsi Jawa Timur)*. Tesis. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Putra, dkk. 2014. *Analisis Efektifitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar)*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 10, No. 1.
- Rinaldi, Udin. 2012. *Kemandirian Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jurnal Eksos Vol. 8, No. 2.
- Safi, Mahmud. 2012. *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pembangunan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kaimana)*. Tesis. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Saharuddin. 2001. *Analisis Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pangkajene di Kepulauan Makassar*. Tesis. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Saputra, Bambang. 2012. *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Korupsi di Indonesia*. Jurnal Borneo Administrator. Vol. 8, No. 3 : 293-309.
- Sasana, Hadi. 2006. *Analisis Kemandirian Fiskal Dilihat dari Sektor-sektor Ekonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Klaten)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 1, No. 2 : 112-125.
- Setiawan, Sigit dan Rudi Handoko. 2005. *Pertumbuhan Ekonomi 2006 : Suatu Estimasi dan Arah Pencapaian Pertumbuhan yang Merata dan Berkualitas*. Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol. 9, No. 4 : 1.
- Sidik, Machfud. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal*. Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta, 13 Maret 2002.
- Silaen, dkk. 2012. *Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008-2010*. Naskah Publikasi. Inderalaya : Universitas Sriwijaya.
- Sriyana, Jaka. 1999. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Reformasi Perpajakan dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Vol. 4, No. 1.
- Suprajitno. Pudji. 2003. *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemandirian Fiskal Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara)*. Semarang : Undip.
- Triani dan Yeni Kuntari. 2010. *Pengaruh Variabel Makro terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar*. ASET. Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 12 No. 1 : 94.
- Widayat, Wahyu. 2000. *Maksimisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen STIE YKPN.
- Yuniarti, Ari. 2008. *Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Perkapita, Tingkat Investasi dan Tingkat Industrialisasi terhadap Kemandirian Daerah Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Soloraya*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Zaenuddin, Muhammad. 2012. *Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Alat Analisis Derajat Otonomi Fiskal Daerah Studi Kasus 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal : 9.